

Kompleksitas dari Kekerasan Rutin Antar Pemuda di Ternate, Maluku Utara

Dian Yanuardy *)

ABSTRAK

Sekelompok pemuda dari desa Mangga Dua, Ternate, menyerang kampung di sebelahnya, Ubo-ubo. Dalam perkelahian itu, satu orang warga Mangga Dua tewas. Tak pelak, dendam meradang di antara dua desa. Bagi Kepala Desa Ubo-ubo, serangan itu terasa lebih mencekam dan mengerikan dibanding peristiwa konflik tahun 1999-2000 di Ternate. "Sejak 3 tahun terakhir, kurang lebih 69 kali perkelahian antar kampung terjadi di daerah sini", katanya. Di pinggir-pinggir jalan desa Mangga Dua, kengerian itu dibalut dengan stigma yang lebih kompleks: "waspadai gerakan komunis". Satu kelompok dari masyarakat desa menuduh desa yang lain "memakai cara-cara dan metode komunis" dalam perkelahian antar kampung. Media massa di Ternate menyatakan bahwa peristiwa itu banyak dimanfaatkan oleh politisi lokal untuk menghitung kekuatan. Sementara, polisi dituduh lamban dan tidak netral menangani kasus ini. Saat menangkap pelaku pembunuhan dari desa Ubo-ubo, polisi menghadapi sekelompok masyarakat yang berupaya melindungi pelaku. Mereka bahkan mengancam akan menyerbu kepolisian. Kini, dendam antar dua kelompok masyarakat masih membara: perkelahian antar kampung di Ternate masih jauh dari usai. Tahun-tahun berikutnya, perkelahian antara pemuda antar kampung antara warga Mangga Dua, Toboko dan Ubo-ubo terus terjadi.

Kata kunci: *pemuda, kekerasan, konflik antar kampung, dan Ternate*

ABSTRACT

A groups of youths from the village Mangga Dua, Ternate, attacked the neighbouring village Ubo-ubo. In the fight, one person from Mangga Dua was killed. As was expected, tensions between the two villages rose. According to the Ubo-ubo village head, the attack was more haunting and terrifying than the events of the 1999-2000 conflict. "In the last three years, approximately 69 fights have broken out between villages in this area." On the edge of Mangga Dua village road, the horror is shrouded in stigma: "beware of the communist movement". One group of villagers accused the other village of "using the way of the communist" in the fight. Mass media in Ternate stated that the incident was widely used by local politicians to accumulate power. Meanwhile, the police were accused of slow and bias responses in handling the incident. After capturing the perpetrators the police were faced with a group of citizens opposing the arrests. The protesters even threatened to attack the police. These days the grudge and tension between the two groups remains strong: conflicts between villages in Ternate are far from over. In the years that followed, the fights between youth groups in Mangga Dua, Toboko, and Ubo-ubo continued to occur.

Keywords: *youth, violence, village conflict and Ternate*

* Penerima Hibah Riset Studi Kepemudaan (HRSK) dari YouSure untuk Kategori Yunior. Dian Yanuardy adalah mahasiswa Pascasarjana Fisipol UGM, dan peneliti di Sajogyo Institute Bogor Indonesia.

PENDAHULUAN

Sepanjang 2010-2011, konflik yang paling sering terjadi di Ternate adalah konflik antar kampung. Perkelahian antar kampung pada umumnya merupakan perkelahian antar kelompok yang melibatkan penduduk kampung Mangga Dua, Ubo-ubo, Toboko dan Dufa-dufa. Konflik ini seringkali melibatkan pemuda dan bahkan menimbulkan korban jiwa. Dalam pengakuan Lurah Toboko, di antara, pemuda kelurahan Toboko dan Mangga Dua saja, pernah terjadi 31 kali perkelahian dalam berbagai skala. Sementara, bagi seorang Lurah di Ubo-ubo, dibandingkan dengan konflik di masa lalu, tahun 1999-2000, perkelahian antar kampung ini memiliki tingkat ketegangan yang cukup besar.

Bagi sebagian pejabat dan beberapa orang, perkelahian antar kampung diakibatkan oleh persoalan minuman keras dan pesta. Namun, pada dasarnya, proses pembentukan kekerasan dan konflik antar kampung ini bekerja dalam cara yang lebih konflik. Kekerasan dan konflik ini banyak diantairai dan difasilitasi oleh kelompok kekerasan yang pada umumnya merupakan orang kuat lokal, yang bisa berupa kelompok jago, preman, atau orang-orang berpengaruh lainnya.

Seringnya terjadi konflik dan kekerasan antar pemuda juga terjadi di lembaga kepemudaan, seperti KNPI. Konflik ini misalnya digambarkan oleh peristiwa persaingan dua kubu pengurus KNPI di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), yakni kubu pengurus KNPI pimpinan Zulkifli Bian dan kubu pengurus KNPI pimpinan Asgar Saleh bentrok di depan Kantor Walikota Ternate, yang merupakan cerminan dari dualisme kepemimpinan KNPI di level nasional. Kubu pengurus KNPI Kota Ternate pimpinan Zulkifli Bian adalah yang diakui oleh DPD KNPI Provinsi Malut, sedangkan kubu pengurus Kota Ternate pimpinan Asgar Saleh adalah yang diakui

oleh Pemkot Ternate. Bentrok antar dua kubu tersebut dipicu oleh adanya ketersinggungan massa KNPI pimpinan Asgar Saleh atas materi orasi massa KNPI Kota Ternate pimpinan Zulkifli Bian yang sedang berdemo di depan Kantor Walikota Ternate. Massa KNPI pimpinan Zulkifli Bian meminta kepada DPRD Kota Ternate untuk membentuk pansus terkait adanya dugaan ketidakberesan dalam pembangunan Masjid Raya Al-Munawwarah yang telah menghabiskan dana APBD sebesar Rp. 41 miliar. Selain itu, dalam orasinya, mereka mempermasalahkan pula penggunaan dana Persiter Ternate yang tidak transparan dan adanya pengalokasian dana APBD Kota Ternate kepada pengurus KNPI Kota Ternate pimpinan Asgar Saleh senilai Rp375 juta. Mendengar materi orasi tersebut, massa KNPI pimpinan Asgar Saleh yang kebetulan juga akan berdemo di depan Kantor Walikota Ternate terpancing emosi dan kemudian menyerang massa KNPI pimpinan Zulkifli Bian, hingga akhirnya terjadi bentrok. Akibat bentrok tersebut, sejumlah pendukung kedua kelompok massa tersebut mengalami cedera (*Surya*, 2 Maret 2009).

Namun, tak mudah untuk mendeskripsikan secara teoritis berbagai peristiwa konflik kekerasan antar pemuda yang bersifat "*ordinary dan everyday violent conflict*" itu. Salah satu kerumitan yang muncul adalah bagaimana melakukan analisis terhadap berbagai peristiwa yang 'seakan-akan' terjadi secara sehari-hari, spontan, acak, tidak terorganisir dan tidak terpola itu. Kerumitan yang lain terletak pada bagaimana membuat analisis yang tidak meletakkan kajian terhadap kekerasan rutin semata-mata sebagai peristiwa, melainkan sebagai sebuah proses yang kompleks, yang tidak semata-mata dilihat sebagai bentuk-bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat negara semata, atau sebagai bentuk frustrasi dari kelas yang secara sosio-

ekonomi terendah, dan atau dengan menunjukkan sifat kejam para pelakunya.

Lalu, bagaimana memahami berbagai peristiwa seperti tawuran antar kampung, pengeroyokan, dan penghakiman massa? Mungkinkah terdapat suatu analisis yang komprehensif yang dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa tersebut? Mungkinkah terdapat suatu kerangka analisis yang keluar dari pemahaman umum terhadap kekerasan rutin sebagai suatu peristiwa bentuk “kekerasan sehari-hari”, sebagai suatu peristiwa “ketidakpercayaan terhadap aparatus negara” atau sebagai kejadian yang bersifat spontan, sporadis dan tak-terorganisir itu?

KEKERASAN RUTIN PEMUDA: MEMPERTANYAKAN ANALISIS NEO-MALTHUSSIAN

Definisi, metodologi dan analisis yang paling mengemuka mengenai kekerasan rutin yang dilakukan pemuda diajukan oleh tulisan-tulisan Mohammad Zoelfan Tadjoeidin (2009), yang pada umumnya mendefinisikan kekerasan rutin sebagai

“neither civil war nor ethno-communal conflict. It refers to regular group violence that is not episodic in nature... routine violence may be a consequence of growth and globalization..it tends to occur spontaneously and sporadically without being led by any organized gang. It also does not lead to capture of any one’s possession...In general, routine violence can be a manifestation of frustration by the lower socio-economic segment of society rather than the greed of those involved”

Pada tulisan yang lain (Murhsed, M. and Tadjoeidin, Z, 2008), didefinisikan bahwa kekerasan rutin seringkali meliputi vigilantisme, perkelahian antar kampung, antar komunitas, yang kadangkala juga memiliki dimensi kriminalitas. Kekerasan rutin di-

identikkan dengan kekerasan sehari-hari yang mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum dan negara serta frustrasi yang menyebar di kalangan masyarakat.

Dalam tulisan Mohammad Zoelfan Tadjoeidin dan kawan-kawan berjudul “*Routine Violence in The Island of Java, Indonesia: Neo Malthusian and Social Justice Perspective*” (Tadjoeidin, et, al, 2010), mendefinisikan dan menganalisis bagaimana kekerasan rutin terjadi. Menurutnya, hal yang menarik dari kekerasan rutin di Indonesia adalah: mengapa kekerasan rutin banyak terjadi di Jawa yang secara etnik merupakan homogen? Lalu kondisi-kondisi apakah yang menyebabkan kekerasan rutin itu terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, analisis yang diajukan oleh para penulis artikel itu adalah bahwa kekerasan rutin terjadi karena kombinasi tekanan populasi yang berhadapan dengan kelangkaan sumber daya alam dengan masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumber daya.

Para penulis artikel tersebut mendeskripsikan bahwa populasi dan faktor demografi merupakan salah satu pilar penyangga kekerasan rutin. Sebab, peningkatan dan tekanan populasi akan menghasilkan suatu penurunan ketersediaan sumber daya per-kapita, yang pada gilirannya akan menciptakan semakin banyaknya kompetisi yang berpotensi menghasilkan konflik. Ada tiga indikator yang digunakan untuk menerangkan antara faktor demografi dengan kekerasan rutin, yaitu kepadatan populasi, banyaknya kaum muda dan pertumbuhan populasi. Sementara, keadilan sosial dalam artikel ini diukur melalui distribusi sumber daya yang tidak merata dan ketimpangan pendapatan, yang dianggap akan menghasilkan bentuk-bentuk kekerasan rutin.

Ketimpangan pendapatan yang berada dalam level tinggi akan meradikalisasikan

kelas pekerja, memperkuat polarisasi kelas, dan menurunkan toleransi untuk partisipasi politik bagi kelas bawah. Ketimpangan dalam hal ini dilihat dalam dua aras: *horizontal inequality* dan *vertical inequality*. *Horizontal inequality* merujuk pada ketimpangan antar kelompok ethno-sosial atau antarwilayah, yang dapat diukur melalui rasio rata-rata pendapatan dari dua kelompok yang berbeda atau dari dua wilayah berbeda. Sementara *vertical inequality* merujuk pada indeks Gini yang mengukur ketimpangan antara individu dengan keseluruhan populasi. Jika, ketimpangan horizontal mendorong munculnya suatu rasa deprivasi relatif antar kelompok, maka ketimpangan vertikal menyebabkan suatu rasa deprivasi personal secara general antara masyarakat yang miskin dengan masyarakat yang berpenghasilan sedang. Jika dua aspek di atas, tekanan populasi dan ketimpangan, digabung maka akan didapatkan sebuah proposisi bahwa kekerasan rutin merupakan hasil dari ketimpangan vertikal yang semakin intensif seiring dengan intensifnya tekanan populasi. Dengan kata lain, jika level ketimpangan dalam suatu masyarakat yang memiliki tekanan populasi besar, maka potensi terjadinya kekerasan rutin juga akan semakin membesar. Apalagi, jika kepadatan populasi dan level ketimpangan itu beriringan dengan banyaknya jumlah pemuda, maka hal itu akan semakin meningkatkan potensi kekerasan rutin. Dengan analisis semacam itu, maka didapati bahwa di Jawa-lah, kekerasan rutin seringkali terjadi. Dengan dihuni oleh sekitar 128 juta orang, maka Jawa merupakan sebuah wilayah yang sangat padat penduduknya. Disertai dengan adanya kelangkaan sumber daya, terus meningkatnya jumlah pemuda, dan efek-efek perubahan iklim serta degradasi lingkungan hidup membuat para penulis artikel itu menyimpulkan bahwa Jawa merupakan sebuah eksemplar yang paling benar bagi skenario Neo-Malthusian

dan menjadi suatu wilayah yang paling rentan bagi terjadinya kekerasan rutin (Tadjoeddin, et, al, 2010).

Apakah kekerasan rutin dapat sederhana dipahami sebagai bentuk kekerasan yang bersifat spontan dan tak terorganisir? Dapatkah kekerasan rutin hanya dipahami sebagai manifestasi frustrasi kalangan kelas bawah semata? Cukupkah memahami penyebab kekerasan rutin semata-mata sebagai akibat langsung dari tekanan populasi di satu sisi dan distribusi pendapatan yang timpang di sisi lain? Tulisan berikut ini berupaya untuk mempertanyakan dan menunjukkan batas-batas dari berbagai kontes definisi dan analisis di atas. Hal itu dilakukan dengan cara menelusuri berbagai kasus kekerasan rutin, memperlihatkan proses-prosesnya yang kompleks---dimana kekerasan rutin tidak semata dipandang sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks. Ia juga bisa berupa sebagai simptom dari lahirnya konflik kekerasan jenis lain. Dengan cara semacam itu, diharapkan tulisan ini sedikit berkontribusi terhadap kontes analisis mengenai kekerasan rutin di Indonesia.

KE ARAH PENDEKATAN EKONOMI POLITIK KONFLIK DAN KEKERASAN

Salah satu kelemahan mendasar dalam menganalisis kekerasan rutin adalah melihat bahwa kekerasan rutin merupakan sebuah peristiwa yang bersifat sporadis dan spontan. Argumen semacam ini mengabaikan bahwa, dalam beberapa kasus, kekerasan rutin sebenarnya seringkali hanyalah "*tampilan luar*" dan "*konsekuensi*" dari berbagai proses-proses yang kompleks. Juga, terlalu mendangkalkan untuk bertumpu pada suatu analisis, sebagaimana yang dianjurkan oleh Zoelfan Tadjoeddin, dkk, bahwa kekerasan rutin terjadi karena ketimpangan pendapatan yang hanya diukur dengan alat

ukur indeks Gini semata. Analisis semacam ini mengabaikan bahwa ketimpangan pendapatan hanyalah sebuah konsekuensi dari proses lain yang mendahuluinya, dan bekerja secara terus-menerus, dan bekerja secara lebih kompleks. Dalam cara pandang yang terakhir ini, maka ketimpangan pendapatan bukanlah suatu *kondisi* yang tiba-tiba terjadi begitu saja, melainkan hasil sebuah *relasi* yang bisa berupa akumulasi, penjarahan, diferensiasi, dan eksploitasi, yang semuanya mesti dibaca dalam dinamika kapital yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama (David Mosse, 2007).

DINAMIKA KAPITAL

Untuk kepentingan itu, maka kita perlu mendiskusikan bagaimana terjadinya ketimpangan pendapatan dan konflik, serta bagaimana keduanya bisa saling berhubungan satu sama lain. Hal ini mungkin dilakukan melalui suatu lensa yang lebih luas mengenai dinamika kapital dan hubungannya dengan konflik dan kekerasan—suatu pendekatan yang mungkin dapat disebut sebagai “*ekonomi politik konflik dan kekerasan*”. Ekonomi politik konflik dan kekerasan bertolak dari suatu argumen bahwa dalam setiap siklus baru kapital selalu menghasilkan konflik dan kekerasan. Reproduksi dan perluasan kapital, karena itu selalu merupakan regenerasi kekerasan. Argumen ini bertolak dari konsep Marx tentang akumulasi primitif. Akumulasi primitif tak dapat dilepaskan dari diskursus mengenai suatu relasi-kapital, yang merupakan suatu “*proses tanpa henti*”. Proses tersebut adalah: kapital mempersyaratkan adanya nilai lebih; dan nilai lebih menyaratkan produksi kapitalis; sementara produksi kapitalis menyaratkan ketersediaan dalam jumlah yang besar kapital dan tenaga kerja di tangan produsen komoditi. Sementara, sebagai prasyarat untuk yang terakhir, produksi

kapitalis menyaratkan “*pemisahan secara sempurna antara tenaga kerja dan kepemilikan alat produksi sebagai kondisi yang memungkinkan untuk terciptanya tenaga kerja bebas*”. Lanjut Marx, produksi kapitalis tidak hanya menjaga pemisahan itu, tetapi mereproduksi pemisahan itu secara konstan dengan skala yang terus bertambah. Prosesnya beroperasi melalui dua transformasi, dimana “*alat subsistensi sosial dan produksi diubah menjadi kapital, dan produsen langsung diubah menjadi tenaga kerja upahan*” (Marx, 1976).

Ringkasnya, apa yang disebut sebagai akumulasi primitif, menurut Marx, tidak lain adalah “*sebuah proses historis yang memisahkan produsen dari alat produksinya*”. Dalam proses ini, sebagaimana dikatakan oleh Marx, maka metode akumulasi primitif adalah *anything but idyllic*—suatu metode yang dalam sejarah kemanusiaan ditulis dengan tinta dari darah dan api. Artinya, proses separasi produsen dari alat produksinya, dan proses penyingkiran relasi-relasi sosial yang bersifat non-kapitalistik dan atau untuk memperdalam relasi kapitalistik yang telah ada seringkali bekerja dengan melibatkan instrumen-instrumen kekerasan, sebagaimana dicontohkan oleh Marx tentang ekspropriasi pertanian di Inggris (Marx, 1976), yang juga melibatkan di dalamnya *extra-economic forces*. Dan, sebagai konsekuensi lebih jauhnya: setiap “*siklus baru kapital selalu memberi jalan bagi munculnya kekerasan*. Reproduksi kapital karena itu merupakan regenerasi kekerasan”. (Shapiro, 2008: 160).

Lalu, apa hasil dari apa yang disebut sebagai akumulasi primitif atau akumulasi dengan penjarahan tersebut? Selain konflik dan kekerasan yang merupakan konsekuensi langsung dari akumulasi primitif, bentuk lainnya yang seringkali muncul adalah *kemiskinan kronik* (Mosse, 2007). Sebagaimana dijelaskan oleh Mosse dalam kasus masyarakat asli Bhil di India,

kemiskinan kronik ini terjadi dari sejarah panjang akumulasi primitif, penjarahan, marginalisasi suku serta pemiskinan produksi komoditi kecil dan diferensiasi pedesaan hingga terciptanya pengangguran dan cadangan tenaga kerja yang tinggi pada masyarakat adat Bhil di India. Dengan penjelasan semacam itu, maka jelaslah bahwa ketimpangan pendapatan tidak bisa dibaca dalam kaca mata indeks Gini semata, melainkan harus dibaca melalui analisis relasional yang memiliki rentang waktu yang panjang tentang bagaimana sekelompok orang mengalami akumulasi, penjarahan, diferensiasi dan eksploitasi.

Proses-proses di atas barulah menciptakan suatu kondisi bagi terjadinya ketimpangan sosial. Dalam analisis tentang konflik dan kekerasan, ketimpangan sosial merupakan lahan subur bagi tersemainya konflik dan kekerasan yang lebih luas. Ia, pendeknya, menjadi lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif. Dalam perspektif strukturalis (Hardiman, 2011), peristiwa-peristiwa kekerasan komunal bukan terjadi secara spontan dan kebetulan, melainkan terjadi dalam konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, proses-proses di atas belum tentu bisa langsung melahirkan kekerasan rutin. Untuk mempermudah penjelasan, akan diambil kasus kekerasan rutin yang berupa perkelahian antar kampung di Ternate, Maluku Utara. Namun, sebelum menjelaskan bagaimana momen koordinasi, relasi patronase, dan pembentukan orang kuat lokal serta ruang-ruang yang digunakan dalam konflik sosial itu terbentuk, kita terlebih dahulu perlu memahami bagaimana proses-proses dan momen-momen terciptanya kemiskinan kronik dan ketimpangan sosial itu terjadi di Maluku Utara.

Secara umum, proses bagi terbentuknya lokus konflik-konflik komunal dan keke-

rasan rutin, yang berupa ketimpangan sosial, sudah berlangsung sejak lama. Di Maluku, misalnya, proses penghancuran ekonomi masyarakat mulai bekerja sejak kedatangan kolonialisme. Sebelum kedatangan Belanda, kolonialisme di Maluku sebenarnya telah dimulai oleh Spanyol dan Portugis. Pada saat kedatangan Belanda yang mengalahkan Portugis di awal abad ke 17 ke daerah yang kaya rempah ini, produksi rempah-rempah yang berupa cengkeh, pala dan kembang pala pada mulanya masih banyak dikuasai oleh penduduk setempat yang dibantu oleh budak-budak lokal dan budak-budak yang didatangkan dari daerah lain (Welie, 2008: 8).

Lalu, kemudian Belanda melalui VOC yang merupakan suatu perseroan dagang Belanda yang didirikan pada tahun 1602 di Nederland, dengan suatu *charter* yang diberikan oleh *Staten General* (Dewan Perwakilan), diberikan hak monopoli atas perdagangan di Timur yang pada permulaan khusus pada perdagangan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala. Hasil-hasil bumi tersebut banyak terdapat di Kepulauan Maluku. Rempah-rempah pada zaman abad ke 16 dan setelah itu merupakan bahan dagang yang mahal dan termasuk barang mewah. Bahan mewah ini makin banyak dibutuhkan di Eropa sejak Perang Salib dan dipergunakan di dapur. Rempah-rempah dipakai untuk pengawetan makanan, menutupi bau busuk, dan untuk memenuhi selera. Penegakan dan dipertahankannya sistem monopoli perdagangan atas rempah-rempah berarti penggunaan kekuatan dan kekerasan senjata pada rival-rival dagang Belanda, baik yang di Eropa maupun di Asia, dan juga pada penduduk setempat yang menghasilkan rempah-rempah. Dilihat dari kaca mata ini, maka kolonialisme Belanda di Maluku dilakukan dengan instrumen-instrumen kekerasan senjata, penciptaan budak-budak perkebunan, dan hilangnya banyak dari penguasaan tanah oleh masyarakat setempat.

Mulai abad ke 17, VOC menuntut suatu hak eksklusif dan monopoli atas rempah-rempah itu, yang kemudian melakukan ekspedisi Hongi, yang merupakan politik untuk mempertahankan monopoli dengan kekerasan. Argumen utama untuk mempertahankan monopoli itu adalah karena di Maluku, para pedagang yang berasal dari Asia dapat membeli kelebihan produksi rempah-rempah yang berada di luar kontrak dengan VOC. Jika para pedagang Asia dapat membeli kelebihan produksi tersebut dan menjualnya pada rival-rival VOC, maka berarti monopoli VOC akan hancur.

Karena itu, VOC harus bisa membatasi produksi rempah-rempah. Untuk itulah diadakan ekspedisi Hongi, yang ditulis dengan tinta dari darah dan api dalam sejarah VOC yang memakan banyak korban penduduk, khususnya di Pulau Banda. Ekspedisi itu mendatangi pulau-pulau yang memproduksi rempah-rempah. Kelebihan produksi dibakar, penduduk yang menentang dibunuh. Sekitar 15.000 penduduk dibunuh atau dideportasi dan dibuang menjadi budak-budak perkebunan, yang mungkin merupakan separuh dari populasi setempat pada masa itu (Reportase *Tempo*, 1992).

Setelah sebagian besar petani rempah-rempah itu dihancurkan, Belanda kemudian menjalankan produksi pala dan bunga pala melalui sistem perkebunan serta mengimpor tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan skala kecil. Bersamaan dengan proses penghancuran di tempat-tempat lain, pada masa itu terciptalah suatu jaringan perdagangan budak, yang dijadikan tenaga kerja untuk sektor-sektor perkebunan Belanda, di seluruh Nusantara. Jaringan perdagangan budak ini berkisar antara dua poros Makassar dan Bali, dimana Makassar menjadi pelabuhan transit utama bagi para budak yang didatangkan dari Kalimantan, Sulawesi, Buton, dan dari pulau-pulau di Timur Laut dan pulau-pulau Timur Nusantara. Sekitar 10.000 budak di

Nusantara pada masa itu dibawa ke Batavia pada abad ke 17, di antaranya 41.66% berasal dari Sulawesi Selatan, 23.98% berasal dari Bali, 12.07% berasal dari Buton, 6.92% dari pulau-pulau Tenggara, dan 6.79% dari Maluku (Markus, 2003: 240).

Pada masa ketika VOC bubar sekalipun, likuidasi itupun tidak berdampak banyak bagi perekonomian masyarakat Maluku Utara, sebab pemerintah Belanda kemudian melanjutkan kebijakan monopoli ala VOC ini. Selain itu, ganti rugi untuk rakyat akibat eksterpasi cengkeh yang dilakukan VOC tidak pernah diberikan pada masyarakat. Ketika pola monopoli ala VOC digantikan dengan perdagangan bebas, pada tahun 1836, misalnya, keadaan ekonomi masyarakat Maluku Utara tidak juga membaik khususnya bagi masyarakat Ternate. Pemberlakuan perdagangan bebas ini, misalnya, memunculkan konglomerasi-konglomerasi baru milik orang Belanda atau elit-elit lokal yang memperoleh hak guna usaha yang menguasai perdagangan, perkebunan, pertambangan dan pelayaran di Maluku (Amal, 2010: 338). Sejak 1880, perusahaan-perusahaan kapitalis swasta melakukan akumulasi kapital secara masif di Maluku Utara di bidang perkebunan, pertambangan dan pelayaran yang membuat sektor ekonomi perkebunan rakyat semakin mengalami kemunduran. Ditambah dengan pemberlakuan kenaikan pajak pada tahun 1926, ini menambah beban dan menggerogoti tingkat pendapatan dan kesejahteraan rakyat dan menambah kesengsaraan, kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat Maluku Utara. Hingga hengkangnya Belanda dari Indonesia, beberapa sektor masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih dalam kondisi yang menyedihkan (Amal, 2010: 341-342).

Proses akumulasi dengan penjarahan yang berkelanjutan ini terus berlangsung dari masa ke masa. Di Ternate, dan di Ma-

luku Utara pada umumnya, hal ini ditunjukkan dengan dibukanya secara brutal izin usaha pertambangan di berbagai daerah di Maluku Utara.¹ Misalnya, sebanyak 310 kuasa pertambangan dibuka di Maluku Utara. Proses inilah yang menciptakan proses dimana mayoritas penduduk pedesaan kehilangan dan keterusiran dari sumber-sumber penghidupannya. Di beberapa wilayah pertambangan di Maluku Utara, para petani selain kehilangan akses atas tanah dan perkebunan yang menjadi gantungan hidupnya, juga mengalami dampak yang berupa tapak-tapak ekologis dari industri pertambangan. Sementara, di sisi lain, wilayah perkotaan juga digempur oleh kapitalisasi kota yang masif yang ditandai oleh tumbuhnya pusat-pusat perdagangan baru di satu sisi dan makin banyaknya kelompok sektor informal perkotaan yang ditandai oleh banyaknya pedagang kaki-lima, tukang ojek dan lain sebagainya yang tinggal di perkampungan yang padat di berbagai pelosok kota Ternate.²

MOMEN KOORDINASI DAN TERCIPTANYA MASSA: RELASI PATRONASE DAN PEMBENTUKAN ORANG KUAT LOKAL

Tetapi, proses-proses di atas belum tentu bisa langsung melahirkan kekerasan rutin. Dinamika kapital saja bisa jadi menghasilkan konflik-konflik jenis lainnya, seperti konflik sumber daya alam atau konflik ekonomi. Dalam kasus kekerasan rutin, dinamika kapital dalam pengertian proses-proses terjadinya akumulasi, penjarahan, diferensiasi dan eksploitasi hanyalah menciptakan lokus bagi lahirnya kekerasan rutin. Untuk itu, maka dibutuhkan beberapa

aspek lain, dalam kasus kekerasan rutin, di antaranya adalah momen koordinasi dan terciptanya massa. Proses ini tercipta melalui relasi patronase dan pembentukan orang kuat lokal atau kelas perantara. Bagian ini akan mendiskusikan suatu aspek dalam kekerasan rutin untuk menunjukkan bahwa kekerasan rutin bukanlah suatu *event* yang spontan dan tak terorganisir.

Hingga tahun 1950an, ekonomi rakyat Ternate masih terus meredup akibat tindakan pemerintah kolonial Belanda yang selama berabad-abad melakukan akumulasi dengan penjarahan yang melakukan monopoli dan melarang perdagangan rempah-rempah pada abad ketujuh belas. Tetapi, sejak tahun 1970an, Ternate berkembang menjadi salah satu kota yang penting di Indonesia Bagian Timur. Pembangunan sarana transportasi laut dan udara meningkatkan perdagangan dan mobilitas antara desa dan kota dan antarpulau di Maluku Utara dan provinsi-provinsi lainnya. Namun, ini tidak berarti tumbuhnya suatu industrialisasi yang kuat di Ternate (Klinken 2007). Sektor industri pada umumnya didominasi oleh kelompok industri kecil dan rumah tangga, yang berjumlah sekitar 403 buah industri kecil dan rumah tangga, yang terbagi di sektor industri kimia dan bangunan, industri pangan dan industri sandang, kulit dan kerajinan, yang hanya menyerap sekitar 1.526 tenaga kerja (BPS, 2010). Belakangan, juga mulai banyak pertambangan nikel, emas dan pasir yang tersebar di Maluku Utara. Pertumbuhan izin usaha pertambangan sangat pesat dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini. Namun, serapan tenaga kerja yang melibatkan penduduk lokal terhitung kecil. Belum lagi dampak-dampak eksternalitas dari usaha pertambangan ini. (Siaran Pers Walhi, 2011). Jika ada industri besar di Maluku Utara, hanyalah pabrik kayu lapis di Sindangoli yang kebanyakan pekerjanya berasal dari Jawa. Sementara, di sektor perdagangan dan sektor informal para pen-

1 Wawancara Ismed, Direktur Walhi Maluku Utara, 23 Juli 2011.

2 Wawancara Herman Usman, Sosiolog dan Dosen Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, 23 Juli 2011.

datang dari Bugis, Makassar, Manado dan Jawa menguasai perdagangan kecil dan menengah, termasuk ekspor ikan beku.

Sementara, jumlah pengangguran di Maluku Utara pada Agustus 2010 mencapai 26,40 ribu orang, bertambah sekitar 0,95 ribu orang dibanding Februari 2010 sebesar 25,45 ribu orang atau mengalami penurunan sebesar 2,16 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2009 sebesar 28,56 ribu orang. Dari angka tersebut, pengangguran di kalangan pemuda merupakan angka yang tertinggi. Dengan latar belakang sosial ekonomi semacam itu, maka orientasi masyarakat Ternate adalah menjadi pegawai negeri dan bekerja di sektor pemerintah (BPS, 2010).

Ketergantungan pada sumber-sumber negara, baik melalui mekanisme resmi menjadi pegawai negeri sipil maupun melalui aktivitas *black economy*—suatu aktivitas untuk mengambil dan menjarah sumber-sumber keuangan negara (*rent seeking*) melalui jaringan patronase untuk kepentingan segelintir kelompok dan jaringan tersebut. Pada dasarnya, ketergantungan pada sumber-sumber negara telah dimulai sejak masa kolonial, yaitu tahun 1930an. Negara memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi perkotaan di daerah-daerah luar Jawa seperti Maluku Utara. Ketergantungan juga semakin menguat sejak Orde Baru tampil sebagai suatu model *state-led developmentalism*—dimana pembangunan-pembangunan daerah-daerah di luar Jawa dipacu, ekspansi peran birokrasi yang diperluas, serta anggaran pembangunan dapat menciptakan lapangan kerja bagi para pengusaha. Salah satu efek dari model semacam ini adalah semakin meningkatnya jumlah pegawai negeri secara dramatis dan pengambilan rente dari sumber-sumber keuangan negara serta menurunnya jumlah pekerja di sektor pertanian (Klinken, 2007). Berbagai hal itu berkombinasi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja dan

lulusan Perguruan Tinggi di Ternate dan semakin lajunya urbanisasi ke Ternate dari berbagai wilayah di Indonesia, terutama ke Ternate bagian Selatan—wilayah-wilayah dimana seringkali terjadi kekerasan rutin dalam bentuk tawuran antar kampung—berkoincidensi dengan dorongan untuk memburu rente dari sumber-sumber negara. Di kalangan pemuda, salah satu cara untuk memburu rente dari sumber-sumber negara tersebut dimungkinkan jika mereka tergabung ke dalam organisasi kepemudaan dan mahasiswa yang memiliki jaringan kepada elit-elit setempat, baik yang berbasiskan kepada etnisitas, kecenderungan afiliasi politik, maupun kekeuargaan.³

Pada dasarnya, proses pembentukan kekerasan dan konflik antar kampung ini bekerja dalam cara yang lebih kompleks. Kekerasan dan konflik ini banyak diperantarai dan difasilitasi oleh kelompok kekerasan yang pada umumnya merupakan orang kuat lokal, yang bisa berupa kelompok jago, preman, atau orang-orang berpengaruh lainnya. Jaringan-jaringan patronase itu pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai orang kuat lokal. Pada konflik yang berupa perkelahian antar kampung dan konflik politik, aktor sekuritisasi pada umumnya adalah orang kuat lokal,⁴ yang pada umumnya

3 Wawancara dengan YB, aktivis mahasiswa 24 Juli 2011.

4 Dalam studi tentang kekerasan di Indonesia, istilah mengenai orang kuat lokal pada umumnya merujuk pada sosok yang berpengaruh di level lokal seperti jago, blater, preman, pemimpin geng, maupun tokoh-tokoh informal lainnya. Orang kuat lokal tidak hanya bisa diasosiasikan sebagai 'kelompok kekerasan', tetapi orang yang bisa memobilisir kelompok massa yang lebih besar, baik untuk tujuan sosial dan politik. Pada dasarnya, selalu terdapat transformasi pada peranan orang kuat lokal pada masyarakatnya, bergantung situasi ekonomi, sosial dan politik. Lihat Frans Husken dan Huub de Jonge (eds) [2003], *Orde Zonder Order: Kekekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, Yogyakarta: LKiS.

merupakan jago, preman, atau tokoh-tokoh berpengaruh di level kampung. Ada proses yang beragam tentang bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Pada umumnya, orang kuat lokal di beberapa perkampungan di perkotaan Ternate merujuk pada kekuatan dan kekuasaan beberapa individu tersebut yang dapat memobilisasi dan memengaruhi massa yang lebih banyak. Proses tentang bagaimana ‘penokohan’ tersebut terjadi sangat beragam. Beberapa orang, misalnya, menjadi orang kuat lokal dikarenakan ia merupakan jagoan di kampung, sebagian yang lain ditentukan oleh kekuatan dan kebesaran pengaruh keluarganya di level kampung, dan sebagian yang lain ditentukan oleh pengaruh politiknya.

Proses bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk seringkali ‘difasilitasi’ oleh kekuatan-kekuatan dan proses-proses politik yang lebih besar. Di titik inilah, peranan kelas perantara (*intermediary class*) yang pada umumnya merupakan suatu kelompok yang terdiri dari kelas kapitalis kecil, elit-elit agraris, pejabat negara lokal yang memainkan peranan melalui pemburuan rente dan *black economy* (pendapatan gelap) yang diambil dari sumber-sumber negara memiliki peranan penting. Kelas perantara ini di antaranya memiliki ciri bahwa ia merupakan lingkaran hubungan-hubungan sosial yang terorganisasi dan mendominasi birokrasi dan proyek-proyek negara di tingkat lokal. Kelas-kelas ini secara efektif dapat memblokir proyek pembangunan negara dengan jalan menghubungkan negara dengan *black economy*. Dengan demikian, mereka mengatur sumber-sumber ekonomi melalui sarana non-negara sambil melakukan *rent-seeking* dan memaksakan praktik-praktik regulatoris dengan memadukan hubungan personal dan reputasi individual dengan kekuatan-kekuatan ekstralegal, plus asosiasi-asosiasi dengan jaringan-jaringan orang kuat lokal yang dapat berdasar pada identitas etnis atau agama (Klinken, 2007: 75-76).

Pada tahapan formasi dan peneguhan identitasnya, misalnya, kelas perantara ini turut mempengaruhi bagaimana orang kuat lokal ini terbentuk. Di Ternate, misalnya, proses itu pada umumnya terbentuk melalui proses politik elektoral. Misalnya, di level kampung pada umumnya dibentuk oleh aktivitas pemuda di ruang-ruang publik semacam tempat nongkrong untuk minum-minuman keras dan bergerombol. Dari ruang semacam itu biasanya kelompok tersebut berasosiasi dan membentuk solidaritasnya. Ruang-ruang berkumpul itu merupakan sumbangan dari para kandidat politik yang menyediakan tempat untuk berkumpul tetapi sekaligus meminta pada orang kuat lokal (preman, jago, pemimpin kultural dsb) yang biasanya menjadi pemimpin kultural di lokasi tersebut untuk menyumbangkan suara dan memobilisasi orang untuk kandidat tersebut.

Bagi para orang kuat lokal, momen itu sekaligus menjadi momen untuk meraih keuntungan ekonomi. Ruang-ruang itu pada akhirnya mengalami pergeseran: dari ruang untuk konsolidasi politik di momen politik elektoral menjadi ruang untuk membangun solidaritas di dalam kampung oleh orang kuat lokal untuk momen-momen tertentu. Sementara, pada momen politik elektoral, orang-orang kuat lokal ini seringkali dijadikan sebagai ‘agen pengamanan’ untuk kandidat tersebut. Dan pada momen pasca elektoral, orang-orang kuat lokal dan berpengaruh ini juga seringkali diandalkan untuk menjadi pionir bagi terselenggaranya proyek-proyek pemerintah yang bersentuhan langsung di level masyarakat. Seluruh proses tersebut pada dasarnya adalah proses untuk membangun dan memelihara dukungan politik dan relasi antara kelompok-kelompok kelas perantara tersebut dengan jaringan orang kuat lokal lainnya.⁵ Karena itu, tak mengherankan jika

5 Wawancara pemuda Mangga Dua dan Dufa-dufa, 23 Juli 2011.

eskalasi sebuah perkelahian antar kampung di Ternate dalam banyak hal ditentukan sejauh mana keterlibatan orang kuat lokal tersebut.

Proses pembentukan massa, selain melalui jaringan patronase tersebut, juga dibalut oleh adanya proses pembentukan identitas melalui stigma. Dalam situasi konflik, stigma selalu memainkan peranan penting. Stigma disini berfungsi sebagai “isolasi satu kelompok terhadap kelompok lain, melalui penyebaran wacana yang seringkali diterima begitu saja sebagai kebenaran”. Stigma ini berfungsi sebagai proses pembentuk “identitas kolektif” yang begitu penting dalam momen koordinasi konflik, karena ia dapat menyeragamkan pikiran dan tindakan massa.⁶ Dalam kasus perkelahian antar kampung, stigma yang bekerja pada umumnya berupa tuduhan bahwa suatu kampung cenderung memiliki kebanggaan atas tradisi tawuran dan perkelahian; suatu kampung menggunakan cara-cara komunis; suatu kampung memiliki banyak ‘jagoan-jagoan’ yang memelihara wibawa dan gengsi daerahnya; suatu kampung banyak melahirkan orang-orang kuat lokal, pejabat pemerintahan, dan akademisi dan lain sebagainya. Stigma ini pada akhirnya membangun identitas kampung kuat dan pada umumnya diresapi secara kuat juga oleh pemuda sembari mengidentifikasi dan memberi perbedaan pada kelompok pemuda lainnya.

PROSES-PROSES POLITIK: SKALA DAN MUTASI KEKERASAN RUTIN

Namun, dinamika kapital sebagai lokus dan jaringan patronase antar kampung sebagai suatu momen koordinasi dan pembentukan massa saja bukanlah suatu yang khas. Ia mungkin tak dapat sepenuhnya menjadi penyebab langsung terjadinya kekerasan

rutin dalam bentuk perkelahian pemuda antar kampung. Bukankah kombinasi dua hal tersebut juga bisa melahirkan konflik sumber daya alam, konflik politik atau bahkan konflik komunal berbasis identitas etnik yang lebih besar? Lalu, dalam situasi-situasi semacam apakah kombinasi dari dua hal di atas dapat menciptakan kekerasan rutin? Apa prasyarat lainnya yang dapat menjadikan bahwa dua hal tersebut berwujud menjadi kekerasan rutin, bukan konflik lainnya?

Pada dasarnya, dalam kasus di Maluku Utara, kekerasan rutin seringkali menampilkan watak lentur dan skala yang berubah-ubah. Pada kasus konflik komunal yang terjadi di tahun 1999-2000 di Maluku Utara, misalnya, menunjukkan mutasi konflik kekerasan dan watak lentur dan dinamika yang berubah-ubah. Pada mulanya, konflik komunal yang mencegangkan di Maluku Utara merupakan sebuah insiden kekerasan rutin yang berupa perkelahian antar kampung, yakni perkelahian antara warga desa Tahane dan Matsa dari suku Makian yang merupakan penganut Islam melawan warga Desa Sosol dan Wangeotak dari suku Kao yang merupakan gabungan antara komunitas Kristen-Muslim. Perkelahian antar kampung itu semakin membesar dan mengakibatkan terjadinya pengungsian ke Ternate. Para simpatisan Muslim kemudian menyerang orang-orang Kristen di Ternate yang kemudian mengungsi ke wilayah Kristen di tempat yang lain. Konflik antar kampung berbasis etnis yang awalnya bersifat lokal akhirnya berubah menjadi konflik agama di level provinsi. Proses ini kemudian memicu konflik antar agama Kristen-Islam di Tobelo, konflik kekerasan antar agama serupa juga terjadi di berbagai tempat-tempat terpencil. Konflik itu kemudian berujung pada konflik politik antara pasukan Kuning (pendukung Kesultanan Ternate) dengan pasukan Putih,

6 F. Budi Hardiman (2011). *Massa, Teror, dan Trauma*. Yogyakarta: Lamalera.

antar orang-orang Muslim (Klinken, 2007: 181-182).

Bagaimana perubahan-perubahan dari perkelahian antar kampung menjadi konflik agama dan konflik politik dapat dijelaskan? Mengapa dan bagaimana suatu kekerasan rutin dapat atau tidak dapat bermutasi menjadi konflik lain yang berskala lebih luas? Fenomena ini dapat diterangkan dengan seberapa luasnya proses-proses politik yang mengakselerasi hal itu. Proses-proses politik tersebut dapat dijelaskan di antaranya melalui beberapa konsep mengenai struktur kesempatan politik---suatu kerangka konseptual yang pada umumnya digunakan oleh teori gerakan sosial, khususnya *resource mobilization theory* (Tarrow, 1994; Mac Adam 1982).

Dalam konteks kekerasan rutin, proses-proses itu dapat berwujud dalam berbagai hal. *Pertama*, derajat stabilitas (juga instabilitas) politik. Sebuah kekerasan rutin, dalam bentuk perkelahian antar kampung dan tawuran, hanya akan berhenti dan terbatas sebagai kekerasan rutin dalam skala lokal jika tidak disertai oleh adanya instabilitas politik dan keretakan-keretakan tertentu dalam aliansi kekuasaan. Terjadinya instabilitas politiklah yang mungkin dapat mendorong perubahan dari kekerasan rutin menjadi konflik antar agama dan berubah lagi menjadi konflik politik sebagaimana dicontohkan dalam kasus konflik Maluku Utara di atas.

Kedua, ketersediaan dukungan elit. Sebuah kekerasan rutin akan bermutasi menjadi konflik yang lebih besar atau hanya terbatas menjadi konflik kekerasan rutin yang bersifat lokal bergantung pada seberapa besar ketersediaan dukungan elit untuk memperbesar atau meredam konflik tersebut. Dalam kasus konflik di Maluku Utara pada tahun 1999-2000, proses bagaimana kekerasan rutin dapat menjadi konflik antar agama dan konflik politik pada akhirnya bergantung pada tersedianya

dukungan elit untuk memperbesar dan menambah bobot dan eskalasi dari konflik tersebut. Namun, ketersediaan dukungan elit untuk memperbesar skala konflik dan kekerasan bukan hanya bergantung pada aksi *volunteer* atau kesukarelawanan, melainkan juga bergantung pada proses-proses politik yang berlangsung dalam skala yang lebih luas. Dalam kasus konflik dan kekerasan rutin yang bermutasi menjadi konflik komunal yang lebih luas di Maluku Utara, misalnya, hal itu terjadi karena adanya krisis politik dan ekonomi di level nasional yang mengakibatkan proses peruntuhan kekuatan politik lama dan pembentukan aliansi-aliansi kekuatan politik baru. Hal inilah yang menyediakan dasar bagi bermutasinya watak dan skala kekerasan rutin.

Proses-proses politik di ataslah yang pada akhirnya menentukan apakah kekerasan rutin hanya memiliki lingkup dan skala yang terbatas dan bersifat lokal ataukah ia dapat bermutasi menjadi kekerasan komunal yang bersifat meluas. Tanpa adanya momen instabilitas politik dan atau dukungan politik elit, maka perkelahian antar kampung bersifat terbatas. Namun, momen-momen politik tertentu yang berskala luas seperti yang memicu konflik, seperti pemilihan kepala umum daerah, dapat membuat jenis-jenis perkelahian antar kampung tersebut tertransformasi dalam bentuk konflik yang lebih luas.

PENUTUP

Kecenderungan untuk mendangkalkan kekerasan rutin hanya semata-mata sebagai peristiwa yang rutin terjadi, atau hanya bertumpu pada kategorisasi mengenai banyak tidaknya jumlah korban, pada akhirnya akan mengabaikan analisis terhadap proses-proses yang kompleks, historis dan mendalam. Dalam kecenderungan definisi semacam ini, kekerasan rutin seakan-

akan hanya menjadi semacam fenomena yang banal dan dangkal. Begitu juga dengan analisis neo-malthusian mengenai kekerasan rutin yang bertumpu karena kombinasi tekanan populasi, utamanya populasi anak muda yang padat, yang berhadapan dengan kelangkaan sumber daya alam dengan masalah keadilan sosial yang diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan dan sumber daya. Seluruh model analisis semacam itu, pada akhirnya mengabaikan bahwa dalam berbagai kasus kekerasan rutin, selalu terdapat proses-proses yang kompleks. Dalam analisis semacam ini, maka kekerasan rutin tidak semata dipandang sebagai semata-mata sebuah peristiwa, melainkan sebagai sebuah konsekuensi dari proses yang kompleks.

Salah satu cara untuk melakukan analisis terhadap kekerasan rutin adalah dengan mengajukan pendekatan ekonomi politik konflik dan kekerasan. Ini dilakukan dengan cara menganalisis dinamika kapital, yaitu dinamika bagaimana eksploitasi, akumulasi, penjarahan, dan marginalisasi berlangsung dalam proses sejarah yang panjang. Analisis semacam itu untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana bagaimana lokus-lokus bagi terciptanya konflik-konflik kolektif dapat terbentuk. Dengan analisis ekonomi politik kekerasan akan dapat digambarkan konstelasi-konstelasi sosial dan ketegangan-ketegangan, dan kontradiksi-kontradiksi tertentu yang hidup dalam masyarakat. Namun, analisis mengenai dinamika kapital saja tidak cukup. Perlu suatu analisis lain mengenai bagaimana momen koordinasi dan terciptanya massa. Untuk membaca pola yang terakhir ini, kita memerlukan analisis mengenai bagaimana jaringan patrimonial dan pembentukan orang kuat lokal terbentuk. Dengan cara semacam ini, maka kekerasan rutin [mungkin] dapat dibaca dan dianalisis melalui relasi-relasi dan proses-proses yang lebih kompleks. Pada akhirnya,

skala dan kemungkinan mutasi kekerasan rutin hanya dapat dipahami melalui tersedia atau tidaknya suatu struktur kesempatan politik dalam bentuk [in]stabilitas politik atau dukungan elit yang mengakselerasi dan atau memberi konfigurasi baru bagi jenis konflik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. Adnan (2010). *Kepulauan Rempah-rempah: Perjalanan Sejarah Maluku Utara 1250-1950*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Barron, Patrick, et, al (2009). "Understanding Violent Conflict in Indonesia: A Mixed Methods Approach." dalam *Social Development Papers, Edisi Conflict, Crime and Violence*. Paper No. 117/ June 2009.
- De Angelis, Massimo. (2004). "Separating The Doing and The Deeds, Capital and Continous Character of Enclosure" dalam *Historical Materialism Journal*. Volume: 12.
- Faturrochman, (1993) "Perang Kecil: Problem yang Tak Berakhir", *Jurnal Psikologi, Universitas Gadjah Mada*. No. 2.
- Hardiman, F. Budi. (2011). *Massa, Teror, dan Trauma*. Yogyakarta: Lamalera.
- Harvey, David, (2003). *New Imperialism*. New York: Oxford.
- _____ 2009. *Neoliberalisme dan Restorasi Kelas Kapitalis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Husken, Frans dan Huub de Jonge (eds) [2003], *Orde Zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*, Yogyakarta: LKiS.
- Klinken, van Gerry (2007), *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marx, Karl (1976). *Capital Volume I*. London: Penguin Classics.
- McAdam, Dough, (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency*. Chicago: University of Chicago Press.

- David Mosse, (2007). "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of The Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty". CPRC Working Paper, No. 107.
- Shapiro, Stephen. (2008), *How To Read Marx's Capital*. London: Pluto Press.
- Tarrow, Sidney G. (1994). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. New York: Cambridge Press.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan. (2007). *A Future Resource Curse in Indonesia: The Political Economy of Natural Resources, Conflict and Development*. CRISE WORKING PAPER No. 35 October.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan and Mansoob Murshed, (2008). "Decentralization Conflict Abating? Routine Violence and District Level Government in Java, Indonesia". *Microcon Research Working Paper 7*, July 2008.
- Tadjoeddin, Muhammad Zoelfan (et, al) (2011) "Routine Violence In The Island of Java, Indonesia: Neo-Malthusian and Social Justice Perspective". Unpublished paper.
- Vink, Markus (2003) "The World's Oldest Trade": Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century *dalam Journal of World History*, Volume 14.
- Rik van Welie, "Slave Trading and Slavery In The Dutch Colonial Empire: A Global Comparison". *New West Indian Guide / Nieuwe West-Indische Gids Journal vol. 82 no. 1 & 2*.
- media/siaran-pers/878-katakan-tidak-untuk-tambang-di-maluku-utara, diunduh pada September 2011.

MAJALAH DAN INTERNET

- Reportase Tempo, Jejak-jejak Monopoli <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1992/04/11/KL/mbm.19920411.KL8880.id.html#>). diunduh pada September 2011.
- Siaran Pers Walhi, Katakan Tidak pada Pertambangan Maluku Utara. Diunduh dari <http://www.walhi.or.id/id/ruang->